



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 577 /V.04/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SEMANGKA TAHUN 2023-2043

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai Semangka merupakan wilayah sungai lintas kabupaten/kota yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa dalam rangka memaksimalkan pengelolaan sumber daya air melalui upaya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air di Wilayah Sungai Semangka dan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan, untuk menjamin terselenggaranya tata pengaturan air dan tata pengairan yang baik pada setiap wilayah sungai dibuat rencana tata pengaturan air dan tata pengairan berupa pola pengelolaan sumber daya air;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Semangka Tahun 2023-2043 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : SA 0201-DA/1462 tanggal 25 Juni 2023, hal Penetapan Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SEMANGKA TAHUN 2023-2024.**
- KESATU : Membentuk Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Semangka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, merupakan kerangka dasar dalam pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai Semangka.

- KETIGA : Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, memuat:
- tujuan pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai;
 - dasar pertimbangan yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya air (termasuk peta tematik isu strategis nasional dan lokal);
 - asumsi, kriteria dan standar; dan
 - skenario kondisi wilayah sungai (termasuk neraca air dan alternatif pilihan strategi serta kebijakan operasional).
- KEEMPAT : Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dapat ditinjau kembali dan dievaluasi kembali paling singkat 5 (lima) tahun sekali sejak ditetapkan.
- KELIMA : Peninjauan dan evaluasi kembali sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat dilakukan melalui konsultasi publik.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 10 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Dirjen. Bina Bangda di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Cq. Dirjen. Sumber Daya Air di Jakarta;
3. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Dinas KPTH Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/577/V.04/HK/2023
TANGGAL : 2 - 10 - 2023

POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI SEMANGKA TAHUN 2023-2043

TUJUAN POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH
SUNGAI

Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Semangka disusun secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan dengan memberikan pemenuhan dan perlindungan dalam memperoleh serta menggunakan sumber daya air untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, meliputi upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

DASAR PERTIMBANGAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR (TERMASUK PETA TEMATIK ISU STRATEGIS
NASIONAL DAN LOKAL)

Dasar pertimbangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Semangka adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (Kode WS Semangka 01.44.8) dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Isu Strategis Nasional



Gambar 1. Isu Strategis Nasional

Isu Strategis Lokal



Gambar 2. Isu Strategis Lokal

Asumsi, Kriteria dan Standar

Asumsi, Kriteria dan standar yang digunakan dalam analisis diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Asumsi

No.	Asumsi
1	Tingkat kepadatan penduduk: tersebar merata di masing-masing kecamatan;
2	Tingkat Pertumbuhan penduduk : Tingkat pertumbuhan Penduduk Kecamatan;
3	Efisiensi Irigasi Yang ada: 50%
4	Efisiensi Irigasi baru: 65%
5	Curah Hujan Efektif: 70% curah hujan andalan 80%
6	Kebutuhan RKI rata sepanjang tahun;
7	Aliran Kembali (<i>return flow</i>) RKI = 80%

Tabel 2. Kriteria

No.	Kriteria
1	Kriteria untuk menganalisis ketersediaan air, kebutuhan air irigasi: Kriteria Perencanaan Irigasi dari Dirjen Sumber Daya Air 2013
2	Kebutuhan air Industri: Kriteria Perencanaan Air Baku, Direktorat Jenderal Cipta Karya (1994) : Industri berat : 0,75 l/dt/ha
3	Kriteria untuk perataan hujan (hujan daerah) : Poligon Thiessen
4	Pola distribusi intensitas hujan : Mononobe
5	Hidrograf Satuan Sintetik : Snyder
6	Kriteria untuk pengalihan data hujan menjadi aliran : F.J. Mock
7	Kriteria untuk menentukan faktor erodibilitas tanah : USDA dan FAO
8	Kriteria untuk menentukan Faktor kelas lereng, penggunaan lahan,dan pengelolaan lahan, kekritisian lahan dan parameter Ekosistem : Kirby, 1984
9	Kriteria untuk menilai kualitas air : Peraturan Pemerintah no. 22, tahun 2021
10	Kriteria pengelolaan wilayah pantai terpadu : Noordwijk Guideline,1993

Tabel 3. Standar

No.	Standar
1	SNI 6728.1:2015, Penyusunan Neraca Spasial Sumber Daya Alam, Bagian 1
2	Irrigation and Drainage Paper, FAO No. 24, 1974, 1977 revised : Crop Water Requirement
3	Kebutuhan air Industri : Direktorat Teknik Penyehatan, Dirjen Cipta Karya DPU yaitu kebutuhan air untuk industri di ambil sekitar 10% dari konsumsi air domestik (<i>The Study of Ciujung-Cidurian Integrated Water Resources</i>), Nippon Koey
4	Evapotranspirasi : <i>Modified Penman</i>

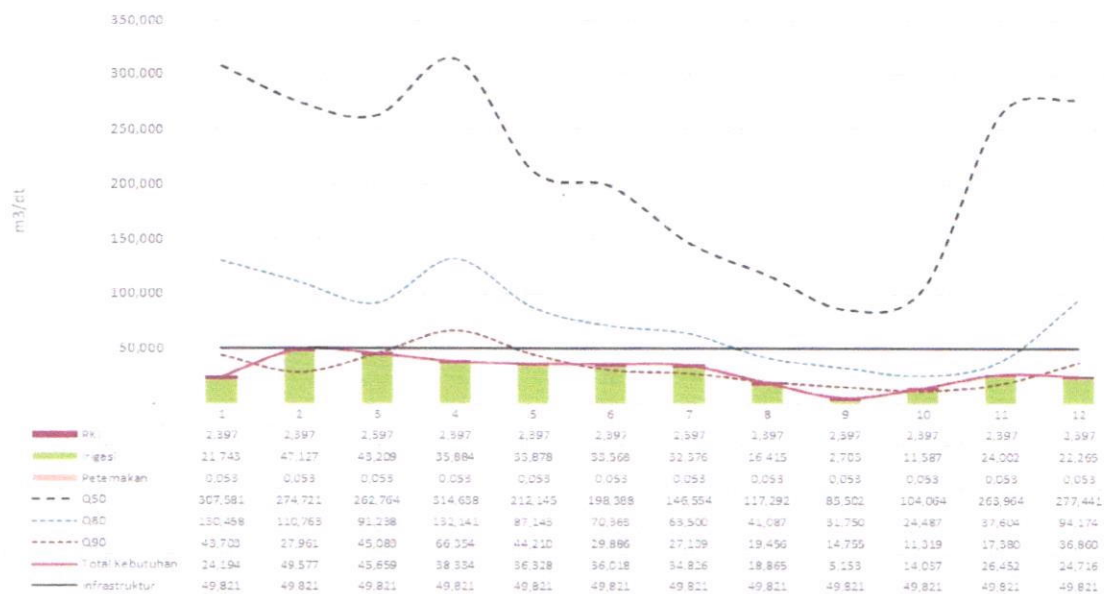
SKENARIO KONDISI WILAYAH SUNGAI (TERMASUK NERACA AIR DAN ALTERNATIF PILIHAN STRATEGI SERTA KEBIJAKAN OPERASIONAL)

Skenario dalam pengelolaan sumber daya air dalam WS Semangka didasarkan pada kondisi keuangan Provinsi dan perekonomian daerah, hal ini disebabkan karena WS Semangka merupakan WS wewenang Provinsi Lampung yang kewenangan pengelolaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Lampung. Namun demikian program-program yang akan dilaksanakan sangat tergantung pada kondisi fisik seperti hidrologi, geologi, hidrogeologi, jenis tanah, morfologi sungai, kesesuaian lahan, tata guna lahan, kawasan hutan, kawasan lindung serta kualitas air serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

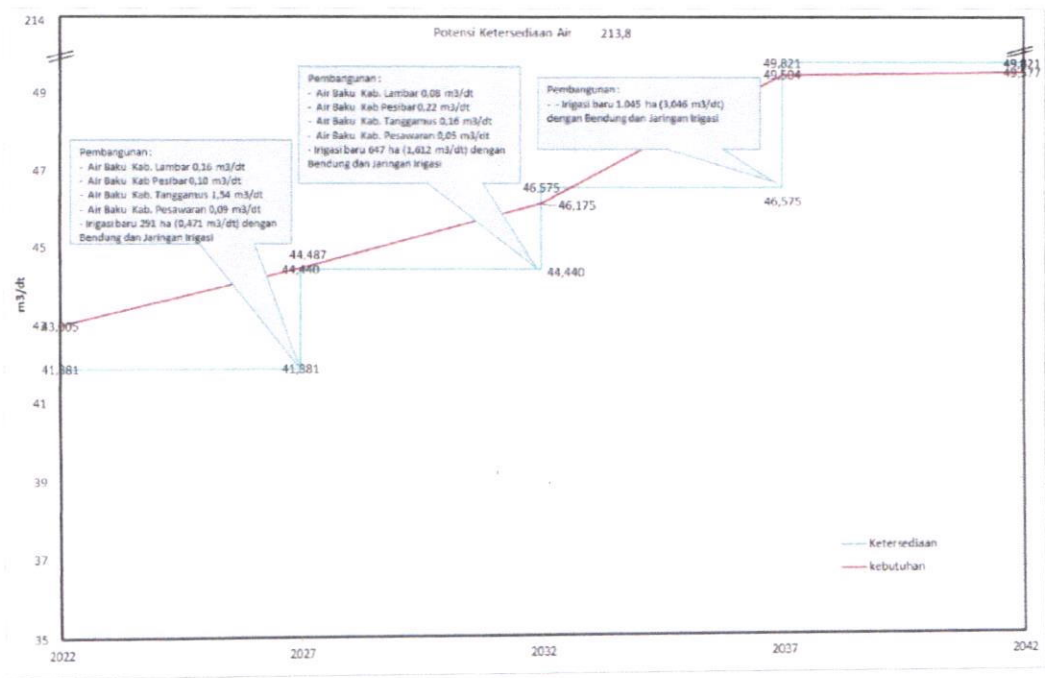
Pelaksanaan program-program yang diusulkan juga harus dilaksanakan secara bertahap yang disesuaikan kemampuan keuangan negara dan berdasarkan skala prioritas. Terkait dengan kemampuan keuangan, maka pertumbuhan ekonomi sebagai tolok ukur kemampuan keuangan dan dibagi dalam pertumbuhan ekonomi tinggi, sedang dan rendah, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Skenario I (Ekonomi tinggi), jika pertumbuhan ekonomi $>5\%$.
2. Skenario II (ekonomi sedang) jika pertumbuhan ekonomi antara $3-5\%$.
3. Skenario III (ekonomi rendah) bila pertumbuhan ekonomi $<3\%$.

Berdasarkan data BPS tahun 2022, pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung pada kuartal I hanya sebesar $2,96\%$, akibat terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 sampai saat ini, masih terasa dampaknya terhadap perekonomian di Provinsi Lampung. Bahkan pada kuartal II tahun 2020 saat awal terjadi pandemi, pertumbuhan ekonomi sempat mengalami $-3,59\%$. Sehingga meskipun saat ini pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung dapat diasumsikan masuk dalam kategori rendah. Namun dengan melihat kecenderungan pertumbuhan yang semakin meningkat, maka mengacu pada pertumbuhan ekonomi tersebut di atas untuk skenario pengelolaan SDA di WS Semangka direkomendasikan skenario sedang.



Gambar 3. Neraca Air WS Semangka Tahun 2042



Gambar 4. Neraca Pemenuhan Kebutuhan Air WS Semangka

Tabel 4. Alternatif Pilihan Strategi dan Kebijakan Operasional Aspek Konservasi

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/Instansi terlibat yang dicetak tebal (Leading Sector)
				Jangka Pendek (2022-2027)	Jangka Menengah (2022-2032)	Jangka Panjang (2022-2042)		
1	PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA AIR	Kekritisan hutan dan lahan semakin luas, sehingga menyebabkan daerah resapan dan tangkapan hujan tidak berfungsi dengan baik	Pemulihan hutan dan lahan kritis dan sangat kritis di Kabupaten Lampung Barat, Pesawaran, Pesisir Barat dan Tanggamus	Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan sangat kritis seluas 16,437 ha	Rehabilitasi hutan dan lahan dengan target lahan kritis dan sangat kritis seluas 157.664 ha	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis dan sangat kritis serta potensial kritis seluas 235.366 ha;	Menetapkan Kawasan lindung minimal 30% dari luas wilayah masing-masing Kabupaten (Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Barat serta Kabupaten Pesisir Barat melalui Perda	Pemerintah - Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) - BPDASHL Seputih Sekampung Pemerintah Provinsi - Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, - Dinas PKPCK Provinsi Lampung - TKPRD Pemda Kab Lambar - Dinas PUPR - TKPRD Pemda Kab Pesawaran - Dinas PUPR - TKPRD Pemda Kab Pesisir Barat - Dinas PUPR - TKPRD Pemda Kab Tanggamus - Dinas PUPR - TKPRD
				Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan sangat kritis Kabupaten Lampung Barat Seluas 2.856 ha.	Rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Lampung Barat dengan target lahan kritis dan sangat kritis seluas 4.162 ha	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis dan sangat kritis serta Potensial kritis di Kabupaten Lampung Barat seluas 12.500 ha	Mengembalikan/Penguatan kembali hutan lindung yang sudah beralih fungsi menjadi peruntukan lain melalui perda/perbup/kepbup Melaksanakan reboisasi rehabilitasi di daerah sangat Kritis, Kritis dan berpotensi kritis	Pemerintah - Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) - BPDASHL Seputih Sekampung Pemerintah Provinsi - Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, - Dinas PKPCK Provinsi Lampung - TKPRD Pemda Kab Lambar - Dinas PUPR - TKPRD

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/Instansi terlibat yang dicetak tebal (Leading Sector)
				Jangka Pendek (2022-2027)	Jangka Menengah (2022-2032)	Jangka Panjang (2022-2042)		
								Pemda Kab Pesawaran - Dinas PUPR - TKPRD Pemda Kab Pesisir Barat - Dinas PUPR - TKPRD Pemda Kab Tanggamus - Dinas PUPR - TKPRD
							Mengembalikan /Penguksan kembali kawasan lindung yang sudah beralih fungsi menjadi peruntukan lain melalui Perda/Perbup/Kepbup	Pemerintah - Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) - BPDASHL Seputih Sekampung Pemerintah Provinsi - Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, - Dinas PKPCK Provinsi Lampung - TKPRD Pemda Kab Lambar - Dinas PUPR - TKPRD Pemda Kab Pesawaran - Dinas PUPR - TKPRD Pemda Kab Pesisir Barat - Dinas PUPR - TKPRD Pemda Kab Tanggamus - Dinas PUPR - TKPRD
				Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan sangat kritis Kabupaten Tanggamus Seluas 11.496 ha	Rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Tanggamus dengan target lahan kritis dan sangat kritis seluas 90.102 ha	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis dan sangat kritis serta potensial kritis di Kabupaten Tanggamus seluas 97.735 ha	Melaksanakan reboisasi rehabilitasi di daerah sangat Kritis, Kritis dan berpotensi kritis	
							Mengembalikan/Pengukuh an kembali hutan lindung yang sudah beralih fungsi menjadi peruntukan lain melalui	Pemerintah - Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS)

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/Instansi terlibat yang dicetak tebal (Leading Sector)
				Jangka Pendek (2022-2027)	Jangka Menengah (2022-2032)	Jangka Panjang (2022-2042)		
							perda/perbup/kepbup Melaksanakan reboisasi rehabilitasi di daerah sangat Kritis, Kritis dan berpotensi kritis	BPDASHL Seputih Sekampung Pemerintah Provinsi - Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, - Dinas PKPCK Provinsi Lampung - TKPRD Pemda Kab Lambar - Dinas PUPR - TKPRD Pemda Kab Pesawaran - Dinas PUPR - TKPRD Pemda Kab Pesisir Barat - Dinas PUPR - TKPRD Pemda Kab Tanggamus - Dinas PUPR - TKPRD
				Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan sangat kritis Kabupaten Pesawaran seluas 1.008 ha	Rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Pesawaran dengan target lahan kritis dan sangat kritis seluas 20.567 ha	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis dan sangat kritis serta potensial kritis di Kabupaten Pesawaran seluas 21.564 ha	Mengembalikan /Penguatan kembali hutan lindung yang sudah beralih fungsi menjadi peruntukan lain melalui perda/perbup/kepbup	Pemerintah - Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) - BPDASHL Seputih Sekampung Pemerintah Provinsi - Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, - Dinas PKPCK Provinsi Lampung - TKPRD Pemda Kab Lambar - Dinas PUPR - TKPRD Pemda Kab Pesawaran - Dinas PUPR - TKPRD Pemda Kab Pesisir Barat - Dinas PUPR - TKPRD Pemda Kab Tanggamus - Dinas PUPR - TKPRD
							Melaksanakan reboisasi rehabilitasi di daerah sangat Kritis, Kritis dan berpotensi kritis	Pemerintah Provinsi - Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, - Dinas PKPCK Provinsi Lampung - TKPRD Pemda Kab Lambar - Dinas PUPR - TKPRD Pemda Kab Pesawaran - Dinas PUPR - TKPRD Pemda Kab Pesisir Barat - Dinas PUPR - TKPRD Pemda Kab Tanggamus - Dinas PUPR - TKPRD

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/Instansi terlibat yang dicetak tebal (Leading Sector)
				Jangka Pendek (2022-2027)	Jangka Menengah (2022-2032)	Jangka Panjang (2022-2042)		
		Peraturan Sumber Daya Air sering dilanggar	Peraturan dan perundang-undangan sumber daya air menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya air	Melaksanakan Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang sumber daya air dan lingkungan	Melaksanakan Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang sumber daya air dan lingkungan	Melaksanakan Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang sumber daya air dan lingkungan	Pembuatan, sosialisasi dan penerapan peraturan dan perundang-undangan tentang sumber daya air dan lingkungan.	Pemerintah - Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) - BPDASHL Seputih Sekampung Pemerintah Provinsi - Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, - Dinas PSDA Provinsi Lampung Pemda Kab Lambar - Dinas PUPR Pemda Kab Pesawaran - Dinas PUPR Pemda Kab Pesisir Barat - Dinas PUPR Pemda Kab Tanggamus - Dinas PUPR
				Melaksanakan Sosialisasi Peraturan-peraturan tentang garis sempadan sungai, rawa, embung situ dan bangunan air lainnya dibarengi dengan pemasangan patok pada sungai orde 1	Melaksanakan Sosialisasi Peraturan-peraturan tentang garis sempadan sungai, rawa, embung situ dan bangunan air lainnya dibarengi dengan pemasangan patok pada sungai orde 1 dan 2	Melaksanakan Sosialisasi Peraturan-peraturan tentang garis sempadan sungai, rawa, embung situ dan bangunan air lainnya dibarengi dengan pemasangan patok pada sungai orde 1, 2.	Menetapkan, memasang patok batas Sempadan, dan melaksanakan operasional dan sungai dan sempadan sungai	Pemerintah - Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) - BPDASHL Seputih Sekampung Pemerintah Provinsi - Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, - Dinas PSDA Provinsi Lampung Pemda Kab Lambar - Dinas PUPR Pemda Kab Pesawaran - Dinas PUPR Pemda Kab Pesisir Barat - Dinas PUPR Pemda Kab Tanggamus - Dinas PUPR
		Sarana dan prasarana konservasi sumber daya air kurang memadai	Terbangunnya dan berfungsinya prasarana konservasi sumber daya air	Membangun sumur resapan dan biopori pada kantor pemerintahan	Membangun sumur resapan dan biopori pada kantor pemerintahan & Swasta	Membangun sumur resapan dan biopori pada kantor pemerintahan dan Swasta serta permukiman	Membangun sarana dan prasarana konservasi sumber daya air antara lain, check dam, biopori, sumur resapan, embung, bendung, bendungan	Pemerintah - Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) - BPDASHL Seputih Sekampung

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/Instansi terlibat yang dicetak tebal (Leading Sector)
				Jangka Pendek (2022-2027)	Jangka Menengah (2022-2032)	Jangka Panjang (2022-2042)		
								Pemerintah Provinsi - Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, - Dinas PSDA Provinsi Lampung Pemda Kab Lambar - Dinas PUPR Pemda Kab Pesawaran - Dinas PUPR Pemda Kab Pesisir Barat - Dinas PUPR Pemda Kab Tanggamus - Dinas PUPR
				Membangun check dam 10 buah.	Membangun check dam 20 buah	Pembangunan check dam 40 buah		Pemerintah - Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) - BPDASHL Seputih Sekampung Pemerintah Provinsi - Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, - Dinas PSDA Provinsi Lampung Pemda Kab Lambar - Dinas PUPR Pemda Kab Pesawaran - Dinas PUPR Pemda Kab Pesisir Barat - Dinas PUPR Pemda Kab Tanggamus - Dinas PUPR
2	PENGAWETAN AIR	Bangunan penampung air hujan kurang memadai sehingga air hujan tidak mampu ditampung secara maksimal	Tersedia dan berfungsinya bangunan penampung air di daerah rawan banjir dan rawan kekeringan	Membangun embung dengan target 5 buah	Membangun embung dengan target 10 buah)	Membangun embung dengan target 20 buah	Membangun embung untuk menampung air hujan, dan berfungsi sebagai tandon air	Pemerintah - Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) - BPDASHL Seputih Sekampung Pemerintah Provinsi - Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, - Dinas PSDA Provinsi Lampung Pemda Kab Lambar

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/Instansi terlibat yang dicetak tebal (Leading Sector)
				Jangka Pendek (2022-2027)	Jangka Menengah (2022-2032)	Jangka Panjang (2022-2042)		
								- Dinas PUPR - Pemda Kab Pesawaran - Dinas PUPR - Pemda Kab Pesisir Barat - Dinas PUPR - Pemda Kab Tanggamus - Dinas PUPR
3	PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR	Kualitas air mengalami penurunan akibat pencemaran limbah baik point source maupun non point source	Kualitas air terjaga sesuai dengan baku mutu	Pemantauan kualitas air secara periodik pada Sungai Orde I pada ruas di hilir lokasi pencemaran	pemantauan kualitas air secara periodik pada Sungai Orde I dan orde 2	pemantauan kualitas air secara periodik pada seluruh Sungai	Melaksanakan pemantauan kualitas air sungai	Pemerintah - BPPW Lampung Provinsi Lampung - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran - Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
		Menurunnya daya dukung dan daya tampung sungai sebagai sarana pembuangan limbah	Daya dukung dan daya tampung sungai terjaga dengan baik	Pembangunan IPAL	Pembangunan IPAL komunal di kantor-kantor pemerintah	Pembangunan IPAL komunal di kantor-kantor pemerintah dan permukiman	Membangun dan melaksanakan sosialisasi fungsi IPAL komunal	Pemerintah - BPPW Lampung Provinsi Lampung - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran - Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/Instansi terlibat yang dicetak tebal (Leading Sector)
				Jangka Pendek (2022-2027)	Jangka Menengah (2022-2032)	Jangka Panjang (2022-2042)		
				Sosialisasi pengelolaan limbah	Pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan kualitas air	Pemerintah - BPPW Lampung Kabupaten Lampung Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran - Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Tabel 5. Alternatif Pilihan Strategi dan Kebijakan Operasional Aspek Pendayagunaan SDA

No	Sub Aspek	Permasalahan	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/Instansi terlibat yang dicetak tebal (Leading Sector)
				Jangka Pendek (2022-2027)	Jangka Menengah (2022-2032)	Jangka Panjang (2022-2042)		
1	PENATAGUNAAN SUMBER DAYA AIR	Pemanfaatan lahan sering melanggar RTRW	Pemanfaatan lahan sesuai dengan pola ruang yang tertuang dalam RTRW Provinsi dan kabupaten	Sosialisasi RTRW yang berlaku (RTRW Provinsi/Kabupaten) sampai tingkat Kabupaten	Sosialisasi RTRW yang berlaku (RTRW Provinsi/Kabupaten) sampai tingkat Kabupaten dan Kecamatan.	Sosialisasi RTRW yang berlaku (RTRW Provinsi/ Kabupaten) sampai tingkat Kabupaten dan Kecamatan dan Kelurahan/Desa.	Melaksanakan sosialisasi RTRW Provinsi/Kabupaten sampai tingkat Kecamatan dan kelurahan/Desa	Pemerintah - BPPW Lampung Provinsi Lampung - Dinas PSDA Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Barat - Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Barat - Dinas PUPR Kabupaten Tanggamus - Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran - Dinas PUPR
							Melaksanakan Evaluasi, peninjauan, dan revisi RTRW Provinsi dan kabupaten di WS Semangka	Pemerintah - BPPW Lampung Provinsi Lampung - Dinas PSDA Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Barat - Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Barat - Dinas PUPR Kabupaten Tanggamus - Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran - Dinas PUPR
				Menetapkan zona Pemanfaatan Air	menetapkan zona Pemanfaatan Air	Penerapan dan sosialisasi zona Pemanfaatan Air	Menyusun, menetapkan melaksanakan dan evaluasi zona pemanfaatan air pada masing masing kabupaten	Pemerintah - BPPW Lampung

No	Sub Aspek	Permasalahan	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/Instansi terlibat yang dicetak tebal (Leading Sector)
				Jangka Pendek (2022-2027)	Jangka Menengah (2022-2032)	Jangka Panjang (2022-2042)		
								Provinsi Lampung - Dinas PSDA Provinsi Lampung - Bappeda Provinsi Lampung - TKPRD Kabupaten Lampung Barat - Dinas PUPR - TKPRD Kabupaten Pesisir Barat - Dinas PUPR - TKPRD Kabupaten Tanggamus - Dinas PUPR - TKPRD Kabupaten Pesawaran - Dinas PUPR - TKPRD
				Menetapkan SOP Perizinan pemanfaatan air	Menetapkan SOP Perizinan pemanfaatan air	Menerapkan SOP Perizinan pemanfaatan air	Membuat dan menerapkan SOP perizinan pemanfaatan air	Pemerintah - BPPW Lampung Provinsi Lampung - Dinas PSDA Provinsi Lampung - Bappeda Provinsi Lampung - TKPRD Kabupaten Lampung Barat - Dinas PUPR - TKPRD Kabupaten Pesisir Barat - Dinas PUPR - TKPRD Kabupaten Tanggamus - Dinas PUPR - TKPRD Kabupaten Pesawaran - Dinas PUPR - TKPRD
2	PENYEDIAAN SUMBER DAYA AIR	Pelayanan air bersih dan sanitasi masih belum mencakup seluruh masyarakat	Pelayanan air bersih dan sanitasi mencapai 100% penduduk terlayani pada tahun 2032.	Penyediaan air baku RKI di ibukota kabupaten	Penyediaan air baku untuk air bersih di ibukota kabupaten dan kecamatan	Penyediaan air baku untuk air bersih di ibukota kabupaten dan kecamatan, pedesaan	Merencanakan dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana air bersih bagi kabupaten dan kecamatan	Pemerintah - BPPW Lampung Provinsi Lampung - Dinas PSDA Provinsi Lampung - Dinas KPTPH Provinsi Lampung - Bappeda Provinsi Lampung

No	Sub Aspek	Permasalahan	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/Instansi terlibat yang dicetak tebal (Leading Sector)
				Jangka Pendek (2022-2027)	Jangka Menengah (2022-2032)	Jangka Panjang (2022-2042)		
								Kabupaten Lampung Barat - Dinas PUPR - Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - PDAM Limau Kunci Kabupaten Pesisir Barat - Dinas PUPR - Dinas Ketahanan Pangan - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah PDAM Kabupaten Tanggamus - Dinas PUPR - Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah PDAM Kabupaten Pesawaran - Dinas PUPR - Dinas Ketahanan Pangan - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PDAM
		Daerah Irigasi masih mengalami defisit air pada saat musim kemarau	Tercukupinya kebutuhan Daerah Irigasi pada musim kemarau	Rehabilitasi dan pemeliharaan sistem irigasi pada daerah irigasi;	Rehabilitasi dan pemeliharaan sistem irigasi pada daerah irigasi;	Rehabilitasi dan pemeliharaan sistem irigasi pada daerah irigasi;	Melaksanakan revitalisasi jaringan irigasi dalam meningkatkan intensitas tanam dan mengatasi kekurangan air di daerah irigasi.	Pemerintah - BPPW Lampung Provinsi Lampung - Dinas PSDA Provinsi Lampung - Dinas KPTPH Provinsi Lampung - Bappeda Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Barat - Dinas PUPR - Dinas Ketahanan Pangan - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat

No	Sub Aspek	Permasalahan	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/Instansi terlibat yang dicetak tebal (Leading Sector)
				Jangka Pendek (2022-2027)	Jangka Menengah (2022-2032)	Jangka Panjang (2022-2042)		
								- Dinas PUPR - Dinas Ketahanan Pangan - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanggamus - Dinas PUPR - Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pesawaran - Dinas PUPR - Dinas Ketahanan Pangan - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				D.I. W. Ngarip, D.I. W. Lalaan, W. Awi, W. Jelai, W. Maja, W. Payung,	D.I. W. Ngarip, D.I. W. Lalaan, W. Awi, W. Jelai, W. Maja, W. Payung,	D.I. W. Ngarip, D.I. W. Lalaan, W. Awi, W. Jelai, W. Maja, W. Payung,		
				D.I. W. Ngarip / Belu, D.I. W. Semangka, D.I.W. Kerep, D.I. W. Biha, D.I. W. Mendati, D.I. W. Gunung, D.I. W. Ngison Sempana, D.I. W. Ngambur	D.I. W. Ngarip / Belu, D.I. W. Semangka, D.I.W. Kerep, D.I. W. Biha, D.I. W. Mendati, D.I. W. Gunung, D.I. W. Ngison Sempana, D.I. W. Ngambur, D.I.W. Payung, D.I. W. Semung, D.I.W. Kunyir, D.I. W. Uluhan Liwa, D.I. W. Seabui, serta D.I.W. Balai Kencana	D.I. W. Ngarip / Belu, D.I. W. Semangka, D.I.W. Kerep, D.I. W. Biha, D.I. W. Mendati, D.I. W. Gunung, D.I. W. Ngison Sempana, D.I. W. Ngambur, D.I.W. Payung, D.I. W. Semung, D.I.W. Kunyir, D.I. W. Uluhan Liwa, D.I. W. Seabui, D.I.W. Balai Kencana; seluruh daerah lainnya		
3	PENGUNAAN SUMBER DAYA AIR	Penggunaan air masih berlebihan dan tidak efisien	Penggunaan air untuk berbagai keperluan secara efektif dan	Memfaatkan teknologi bercocok tanam padi Sistem Rice	memanfaatkan teknologi bercocok tanam padi Sistem Rice Intensification (SRI) dengan target 15%	memanfaatkan teknologi bercocok tanam padi Sistem Rice Intensification (SRI)	Melaksanakan Sosialisasi, pelatihan dan percontohan pemanfaatan teknologi pertanian hemat air	Pemerintah - BPPW Lampung Provinsi Lampung

No	Sub Aspek	Permasalahan	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/Instansi terlibat yang dicetak tebal (Leading Sector)
				Jangka Pendek (2022-2027)	Jangka Menengah (2022-2032)	Jangka Panjang (2022-2042)		
			efisien	Intensification (SRI) dengan target 10%.		dengan target 30%		- Dinas PSDA Provinsi Lampung - Dinas KPTPH Provinsi Lampung - Bappeda Provinsi Lampung - Kabupaten Lampung Barat - Dinas PUPR - Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - PDAM Limau Kunci - Kabupaten Pesisir Barat - Dinas PUPR - Dinas Ketahanan Pangan - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah - PDAM - Kabupaten Tanggamus - Dinas PUPR - Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah - PDAM - Kabupaten Pesawaran - Dinas PUPR - Dinas Ketahanan Pangan - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - PDAM
4	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Pemanfaatan Sumber Daya Air yang ada belum optimal	Pemanfaatan sumber daya air lebih optimal, sehingga outcome irigasi semakin meningkat	Pembangunan daerah irigasi baru yakni;	Pembangunan daerah irigasi baru yakni;	Pembangunan daerah irigasi baru yakni;	Mengalokasikan dana untuk melakukan perencanaan detail dan pembangunan Daerah Irigasi Baru di Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Barat serta Kabupaten Pesisir Barat	Pemerintah - BPPW Lampung - Provinsi Lampung - Dinas PSDA Provinsi Lampung - Dinas KPTPH Provinsi Lampung - Bappeda Provinsi Lampung
				2 D.I. seluas 226 ha di Kab. Lampung Barat;	6 D.I. seluas 532 ha di Kab. Lampung Barat;	13 D.I. seluas 1144 ha di Kab. Lampung Barat;		
				5 D.I. seluas 358 ha di Kab. Tanggamus;	8 D.I. seluas 568 ha di Kab. Tanggamus;	18 D.I. seluas 1380 ha di Kab. Tanggamus;		

No	Sub Aspek	Permasalahan	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/Instansi terlibat yang dicetak tebal (Leading Sector)
				Jangka Pendek (2022-2027)	Jangka Menengah (2022-2032)	Jangka Panjang (2022-2042)		
				11 D.I. seluas 1112 ha di Kab. Pesisir Barat;	19 D.I. seluas 2366 ha di Kab. Pesisir Barat;	24 D.I. seluas 4094 ha di Kab. Pesisir Barat;		Kabupaten Lampung Barat - Dinas PUPR - Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - PDAM Limau Kunci Kabupaten Pesisir Barat - Dinas PUPR - Dinas Ketahanan Pangan - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah PDAM Kabupaten Tanggamus - Dinas PUPR - Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah - PDAM Kabupaten Pesawaran - Dinas PUPR - Dinas Ketahanan Pangan - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - PDAM
				1 D.I. seluas 60 ha di Kab. Pesawaran.	2 D.I. seluas 180 ha di Kab. Pesawaran.;	3 D.I. seluas 320 ha di Kab. Pesawaran.;		
			Pemanfaatan potensi sumber daya air untuk pengadaan energi listrik	Membangun 3 PLTA kapasitas 73,8 MW di Way Semong dan Way Semangka.	Membangun 5 PLTA kapasitas 114,7 MW di Way Semong dan Way Semangka	Membangun 6 PLTA kapasitas 187,4 MW di Way Semong dan Way Semangka.	Membuat perizinan dan kerjasama dengan BUMN (PLN)/Investor dalam dan luar negeri untuk melakukan pembangunan PLTA	Pemerintah - BPPW Lampung Provinsi Lampung - Dinas PSDA Provinsi Lampung - Dinas KPTPH Provinsi Lampung - Bappeda Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Barat - Dinas PUPR - Dinas Ketahanan Pangan - Badan Perencanaan

No	Sub Aspek	Permasalahan	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/Instansi terlibat yang dicetak tebal (Leading Sector)
				Jangka Pendek (2022-2027)	Jangka Menengah (2022-2032)	Jangka Panjang (2022-2042)		
								Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat - Dinas PUPR - Dinas Ketahanan Pangan - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanggamus - Dinas PUPR - Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pesawaran - Dinas PUPR - Dinas Ketahanan Pangan - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PT. PLN

Tabel 6. Alternatif Pilihan Strategi dan Kebijakan Operasional Aspek Pengendalian Daya Rusak Air

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Dinas Instansi yang terlibat yang dicetak tebal (Leading Sector)
				Jangka Pendek (2022-2027)	Jangka Menengah (2022-2032)	Jangka Panjang (2022-2042)		
1	Pencegahan	Masyarakat sering tidak menyadari berada/tinggal pada lokasi rawan bencana	Masyarakat sadar berada di lokasi banjir dan bersedia migrasi ke daerah yang lebih aman (alokasi lahan untuk permukiman)	Menginventarisir dan memetakan daerah rawan bencana longsor, banjir dan kekeringan serta abrasi	Menginventarisir dan memetakan serta memasang tanda bahaya daerah rawan bencana longsor, banjir dan kekeringan serta abrasi	menginventarisir, memetakan dan memasang tanda bahaya daerah rawan bencana longsor, banjir dan kekeringan, abrasi serta melakukan simulasi tanggap darurat	Melaksanakan sosialisasi daerah rawan bencana alam (banjir, tanah longsor, kekeringan, tsunami)	Pemerintah - Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) - BPDASHL Seputih Sekampung Provinsi Lampung - Dinas PSDA Provinsi Lampung - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung - Dinas Kehutanan Provinsi Lampung - Bappeda Provinsi Lampung - BPBD Provinsi Lampung - Kabupaten Lampung Barat - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - BPBD - Kabupaten Pesisir Barat - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah - BPBD - Kabupaten Tanggamus - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah - BPBD - Kabupaten Pesawaran - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Dinas Instansi yang terlibat yang dicetak tebal (Leading Sector)
				Jangka Pendek (2022-2027)	Jangka Menengah (2022-2032)	Jangka Panjang (2022-2042)		
								Pembangunan Daerah - BPBD
		Perlu pembangunan struktur pengendalian erosi/banjir/longsor pada lokasi rawan bencana	Meminimalisir kerugian akibat bencana pada lokasi rawan bencana	Melaksanakan pembangunan struktur pengendalian erosi, pengendali banjir, dan penahan tanah longsor pada lokasi kerawanan bencana tinggi	Melaksanakan pembangunan struktur pengendalian erosi, pengendali banjir, dan penahan tanah longsor pada lokasi kerawanan bencana tinggi dan sedang	Melaksanakan pembangunan struktur pengendalian erosi, pengendali banjir, dan penahan tanah longsor pada lokasi kerawanan bencana tinggi dan sedang	Melaksanakan pembangunan pengendali erosi, pengendali banjir, dan penahan tanah longsor	Pemerintah - Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) - BPDASHL Seputih Sekampung Provinsi Lampung - Dinas PSDA Provinsi Lampung - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung - Dinas Kehutanan Provinsi Lampung - Bappeda Provinsi Lampung - BPBD Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Barat - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - BPBD Kabupaten Pesisir Barat - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah - BPBD Kabupaten Tanggamus - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah - BPBD Kabupaten Pesawaran - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - BPBD

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Dinas Instansi yang terlibat yang dicetak tebal (Leading Sector)
				Jangka Pendek (2022-2027)	Jangka Menengah (2022-2032)	Jangka Panjang (2022-2042)		
		Kerugian akibat banjir sering menjadi besar karena manusia, ternak dan harta benda lain tidak sempat dievakuasi	Kejadian bencana alam dapat terdeteksi sejak dini, sehingga kerugian akibat bencana dapat diminimalisir	Pemasangan sistem peringatan dini bahaya banjir / Flood Warning System di ruas sungai rawan banjir seperti di Way Semangka daerah Wonosobo	Pemasangan sistem peringatan dini bahaya banjir / Flood Warning System di ruas sungai rawan banjir seperti di Way Semangka daerah Wonosobo dan Suoh	pemasangan sistem peringatan dini bahaya banjir / Flood Warning System di ruas sungai rawan banjir seperti di Way Semangka daerah Wonosobo dan Suoh dan sungai-sungai lainnya	Pemasangan sistem peringatan dini bahaya banjir / Flood Warning System	Pemerintah - Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) - BPDASHL Seputih Sekampung Provinsi Lampung - Dinas PSDA Provinsi Lampung - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung - Dinas Kehutanan Provinsi Lampung - Bappeda Provinsi Lampung - BPBD Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Barat - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - BPBD Kabupaten Pesisir Barat - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah - BPBD Kabupaten Tanggamus - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah - BPBD Kabupaten Pesawaran - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - BPBD
		Terjadi pendangkalan sungai akibat	Sedimentasi dapat dikendalikan	Pembuatan dan pemanfaatan Tampungan	Memfungsikan Longstorage di Way Semangka dan way	Memfungsikan Longstorage di Way Semangka dan Way	Menjaga dan melestarikan longstorage sungai	Pemerintah - Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Dinas Instansi yang terlibat yang dicetak tebal (Leading Sector)
				Jangka Pendek (2022-2027)	Jangka Menengah (2022-2032)	Jangka Panjang (2022-2042)		
		sedimentasi di alur	sehingga sungai tidak mudah dangkal	memanjang sungai (Longsotage)	Semong, serta sungai orde 1	Semong, serta sungai orde 1		(BBTNBBS) - BPDASHL Seputih Sekampung Provinsi Lampung - Dinas PSDA Provinsi Lampung - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung - Dinas Kehutanan Provinsi Lampung - Bappeda Provinsi Lampung - BPBD Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Barat - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - BPBD Kabupaten Pesisir Barat - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah - BPBD Kabupaten Tanggamus - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah - BPBD Kabupaten Pesawaran - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - BPBD
		Sarana pengendalian debit banjir masih kurang	Tersedianya dan berfungsinya bangunan pengendali banjir	Membangun check dam dan normalisasi sungai (10 buah check dam).	Pembangunan check dam 30 buah	Pembangunan check dam 70 buah	Melaksanakan perencanaan detail, konstruksi dan OP Check Dam	Pemerintah - Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) - BPDASHL Seputih Sekampung Provinsi Lampung

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Dinas Instansi yang terlibat yang dicetak tebal (Leading Sector)
				Jangka Pendek (2022-2027)	Jangka Menengah (2022-2032)	Jangka Panjang (2022-2042)		
								- Dinas PSDA Provinsi Lampung - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung - Dinas Kehutanan Provinsi Lampung - Bappeda Provinsi Lampung - BPBD Provinsi Lampung - Kabupaten Lampung Barat - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - BPBD - Kabupaten Pesisir Barat - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah - BPBD - Kabupaten Tanggamus - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah - BPBD - Kabupaten Pesawaran - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - BPBD
2	Penanggulangan	Sistem Penanggulangan bencana belum Optimal	Tersedia dan berfungsinya sistem penanggulangan bencana alam	Menyusun Rencana Tindak Darurat (RTD), dan sosialisasi	Menyusun Rencana Tindak Darurat (RTD) dan sosialisasi sistem penanggulangan bencana	Menyusun Rencana Tindak Darurat (RTD) dan sosialisasi sistem penanggulangan bencana	Menyusun dan melaksanakan sosialisasi RTD secara berkesinambungan	Pemerintah - Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) - BPDASHL Seputih Sekampung Provinsi Lampung - Dinas PSDA Provinsi Lampung - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Dinas Instansi yang terlibat yang dicetak tebal (Leading Sector)
				Jangka Pendek (2022-2027)	Jangka Menengah (2022-2032)	Jangka Panjang (2022-2042)		
								- Dinas Kehutanan Provinsi Lampung - Bappeda Provinsi Lampung - BPBD Provinsi Lampung - Kabupaten Lampung Barat - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - BPBD - Kabupaten Pesisir Barat - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah - BPBD - Kabupaten Tanggamus - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah - BPBD - Kabupaten Pesawaran - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - BPBD
				pengadaan peralatan sistem peringatan dini bahaya banjir.	pelatihan dan simulasi tanggap darurat	pelatihan dan simulasi tanggap darurat	Menyelenggarakan simulasi bencana alam (banjir, Tsunami, kebakaran, gempa dll) sekali dalam setahun	Pemerintah - Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) - BPDASHL Seputih Sekampung Provinsi Lampung - Dinas PSDA Provinsi Lampung - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung - Dinas Kehutanan Provinsi Lampung - Bappeda Provinsi Lampung

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Dinas Instansi yang terlibat yang dicetak tebal (Leading Sector)
				Jangka Pendek (2022-2027)	Jangka Menengah (2022-2032)	Jangka Panjang (2022-2042)		
								- BPBD Provinsi Lampung - Kabupaten Lampung Barat - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - BPBD - Kabupaten Pesisir Barat - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah - BPBD - Kabupaten Tanggamus - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah - BPBD - Kabupaten Pesawaran - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - BPBD
				Pengadaan peralatan sistem peringatan dini bahaya banjir dan tsunami	Pengadaan peralatan sistem peringatan dini bahaya banjir dan tsunami	Pengadaan peralatan sistem peringatan dini bahaya banjir dan tsunami		Pemerintah - Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) - BPDASHL Seputih Sekampung - Provinsi Lampung - Dinas PSDA Provinsi Lampung - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung - Dinas Kehutanan Provinsi Lampung - Bappeda Provinsi Lampung - BPBD Provinsi Lampung - Kabupaten Lampung Barat - Dinas PUPR

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Dinas Instansi yang terlibat yang dicetak tebal (Leading Sector)
				Jangka Pendek (2022-2027)	Jangka Menengah (2022-2032)	Jangka Panjang (2022-2042)		
								- Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - BPBD - Kabupaten Pesisir Barat - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah - BPBD - Kabupaten Tanggamus - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah - BPBD - Kabupaten Pesawaran - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - BPBD
3	Pemulihan	Pemulihan fungsi lingkungan belum berhasil guna	Kondisi lingkungan dan masyarakat dapat pulih kembali, sehingga dapat melaksanakan kegiatan secara normal.	rehabilitasi /normalisasi jaringan drainase dan sungai orde 1 DAS Semangka	melakukan rehabilitasi/normalisasi jaringan drainase dan sungai orde 1 pada WS Semangka	melakukan rehabilitasi/normalisasi jaringan drainase dan sungai orde 1 pada WS Semangka	Identifikasi dan inventarisasi kerusakan bangunan akibat bencana alam	Pemerintah - Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) - BPDASHL Seputih Sekampung Provinsi Lampung - Dinas PSDA Provinsi Lampung - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung - Dinas Kehutanan Provinsi Lampung - Bappeda Provinsi Lampung - BPBD Provinsi Lampung - Kabupaten Lampung Barat - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Dinas Instansi yang terlibat yang dicetak tebal (Leading Sector)
				Jangka Pendek (2022-2027)	Jangka Menengah (2022-2032)	Jangka Panjang (2022-2042)		
								- BPBD Kabupaten Pesisir Barat - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah - BPBD Kabupaten Tanggamus - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah - BPBD Kabupaten Pesawaran - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - BPBD
			rehabilitasi dan pembangunan Bangunan pengendali banjir yang rusak	rehabilitasi dan pembangunan Bangunan pengendali banjir yang rusak	Membuat sistem sungai dan drainase secara menyeluruh untuk pemulihan kondisi pasca bencana	Membuat sistem sungai dan drainase secara menyeluruh untuk pemulihan kondisi pasca bencana	Penyiapan dana yang memadai untuk melaksanakan rehabilitasi/ pembangunan kembali bangunan pendanganlian bencana alam	Pemerintah - Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) - BPDASHL Seputih Sekampung Provinsi Lampung - Dinas PSDA Provinsi Lampung - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung - Dinas Kehutanan Provinsi Lampung - Bappeda Provinsi Lampung - BPBD Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Barat - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - BPBD Kabupaten Pesisir Barat - Dinas PUPR

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Dinas Instansi yang terlibat yang dicetak tebal (Leading Sector)
				Jangka Pendek (2022-2027)	Jangka Menengah (2022-2032)	Jangka Panjang (2022-2042)		
								- Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah - BPBD - Kabupaten Tanggamus - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah - BPBD - Kabupaten Pesawaran - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - BPBD
					rehabilitasi tanggul pengendali banjir	rehabilitasi tanggul pengendali banjir	Pembangunan dan rehabilitasi terhadap fasilitas yang rusak	Pemerintah - Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) - BPDASHL Seputih Sekampung Provinsi Lampung - Dinas PSDA Provinsi Lampung - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung - Dinas Kehutanan Provinsi Lampung - Bappeda Provinsi Lampung - BPBD Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Barat - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - BPBD Kabupaten Pesisir Barat - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Dinas Instansi yang terlibat yang dicetak tebal (Leading Sector)
				Jangka Pendek (2022-2027)	Jangka Menengah (2022-2032)	Jangka Panjang (2022-2042)		
								Pengembangan Daerah - BPBD Kabupaten Tanggamus - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah - BPBD Kabupaten Pesawaran - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - BPBD
				Sosialisasi dan Koordinasi Program, Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan/Kerugian, Perencanaan dan Penetapan Prioritas, Mobilisasi Sumberdaya, Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Rehabilitasi	Sosialisasi dan Koordinasi Program, Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan/Kerugian, Perencanaan dan Penetapan Prioritas, Mobilisasi Sumberdaya, Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Rehabilitasi	Sosialisasi dan Koordinasi Program, Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan/Kerugian, Perencanaan dan Penetapan Prioritas, Mobilisasi Sumberdaya, Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Rehabilitasi	Melibatkan seluruh stakeholder dalam upaya pemulihan akibat bencana, sehingga korban dan pelaku menjadi gerakan bersama	Pemerintah - Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) - BPDASHL Seputih Sekampung Provinsi Lampung - Dinas PSDA Provinsi Lampung - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung - Dinas Kehutanan Provinsi Lampung - Bappeda Provinsi Lampung - BPBD Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Barat - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - BPBD Kabupaten Pesisir Barat - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah - BPBD Kabupaten Tanggamus

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Dinas Instansi yang terlibat yang dicetak tebal (Leading Sector)
				Jangka Pendek (2022-2027)	Jangka Menengah (2022-2032)	Jangka Panjang (2022-2042)		
								- Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah - BPBD Kabupaten Pesawaran - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - BPBD
					memberikan bantuan sebagai upaya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat	memberikan bantuan sebagai upaya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat	Membentuk Krisis center Bencana	Pemerintah - Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) - BPDASHL Seputih Sekampung Provinsi Lampung - Dinas PSDA Provinsi Lampung - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung - Dinas Kehutanan Provinsi Lampung - Bappeda Provinsi Lampung - BPBD Provinsi Lampung - Kabupaten Lampung Barat - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - BPBD - Kabupaten Pesisir Barat - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah - BPBD - Kabupaten Tanggamus - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Dinas Instansi yang terlibat yang dicetak tebal (Leading Sector)
				Jangka Pendek (2022-2027)	Jangka Menengah (2022-2032)	Jangka Panjang (2022- 2042)		
								Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah - BPBD Kabupaten Pesawaran - Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - BPBD

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI